



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**UNIT KERJA** : KECAMATAN KERTOSONO

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MASHUDI NURUL HUDA
2. Jabatan : CAMAT KERTOSONO
3. NHK : 733414

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/160 m2 di KEDIRI, HIBAH  
DENGAN AKTA Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 157.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G F601RM GMMFJJ Tahun 2010,  
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA T4G02T31LO MT Tahun 2020, HASIL SENDIRI  
Rp. 30.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 160 SEPEDAH MOTOR Tahun 2022,  
HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 28.617

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 457.028.617

**III. HUTANG** Rp. 47.301.164

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 409.727.453

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.